

FRAKSI PAN DAN PKB BERMANUVER

Pembentukan Alkap DPRD Sleman Gagal

SLEMAN (KR) - Agenda DPRD Sleman kemarin adalah rapat paripurna pembentukan alat kelengkapan (alkap). Namun pembentukan alkap itu gagal karena Fraksi PAN dan PKB bermanuver menjelang rapat paripurna.

Sebelumnya, DPRD telah menjadwalkan rapat paripurna pembentukan alkap pukul 13.00. Pada pukul 12.00, pimpinan DPRD bersama pimpinan fraksi diawali rapat konsultasi pembentukan alkap. Namun siang itu, ada surat dari Fraksi PAN yang meminta sebelum pembentukan alkap perlu untuk penyusunan tatib DPRD. Dengan adanya surat tersebut, Pimpinan DPRD memutuskan meng-

ubah rapat paripurna pembentukan alkap menjadi rapat paripurna penetapan rancangan Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD Periode 2024-2029. Pada saat rapat paripurna digelar, Fraksi PKB langsung melakukan interupsi. Sekretaris Fraksi PKB Syukron Arif Muttaqin SE MAP menya-yangkan adanya perubahan agenda kegiatan DPRD Sleman yang sebelumnya terjadwal Rapat Paripurna

Pembentukan Alat Kelengkapan DPRD Sleman Periode 2024 -2029, secara mendadak diganti Rapat Paripurna Penetapan Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Sleman Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan DPRD Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman Periode 2024 -2029. “Perubahan agenda yang mendadak dan agenda tulisan

yang tidak lengkap,” kata Sukron.

Terkait dengan agenda penetapan perubahan tata tertib DPRD Kabupaten, FPKB berpendapat belum dapat dilaksanakan karena materi tata tertib belum diterimakan kepada anggota kami secara formal. Sehingga FPKB DPRD Kabupaten Sleman tidak bisa melakukan pencermatan dan pendalaman pada materi raperda tersebut. “Kami minta Pimpinan untuk melaksanakan mekanisme pembahasan tata tertib sesuai dengan aturan dan ketentuan perundangan yang berlaku,”

ujarnya. Setelah melakukan instrupsi, anggota Fraksi PKB langsung melakukan walk out meninggalkan ruang rapat paripurna sebelum rapat paripurna ditutup.

Menanggapi instrupsi tersebut, Ketua DPRD Sleman Y Gustan Ganda ST menyebut, perubahan agenda rapat tersebut sudah sesuai hasil rapat konsultasi pimpinan fraksi. Sedangkan untuk materi tata tertib, anggota Fraksi PKB untuk komunikasi dengan internal. “Silakan anggota Fraksi PKB berkomunikasi di internal. Untuk rapat paripurna ditu-

tup dan cukup sekian,” katanya.

Terpisah, Wakil Ketua Fraksi PAN Respati Agus Sasangka SIP mengatakan, berdasarkan peraturan DPRD No. 1 Tahun 2020 dan PP No. 12 Tahun 2018, pimpinan sementara memfasilitasi penyusunan rancangan peraturan DPRD tentang Tatib DPRD. Sementara sampai saat ini, anggota DPRD periode 2024-2029 belum difasilitasi penyusunan rancangan peraturan DPRD tentang Tatib DPRD.

“Untuk itu Fraksi PAN belum bisa mengirimkan nama-nama anggota Frak-

si PAN ke Komisi dan Badan. Fraksi PAN berpendapat perlu untuk menyusun Tatib DPRD karena ada yang perlu diperdalam dan lebih didetailkan lagi. Setelah dibahas, baru segera membentuk alkap,” ujarnya.

Sekretaris DPD PAN Sleman Raden Inoki AP menambahkan, proses pembentukam alkap ini, pihaknya melihat prosesnya belum sesuai dengan tatib yang ada. Untuk itu, pihaknya meminta rapat paripurna pembentukan alkap ditunda dan diminta membahas tatib terlebih dulu. **(Sni)-f**

Penyuluh Agama Islam Dituntut Kreatif



KR-Antri Yudiansyah

Penyerahan wakaf oleh Kepala Kanwil Kemenag DIY Dr Ahmad Baheij (kanan) pada Ketua DMI DIY.

SLEMAN (KR) - Penyuluh Agama Islam di lingkungan Kanwil Kemenag DIY dituntut kreatif dalam menjalankan tugas sebagai ujung tombak penyebaran nilai-nilai Agama Islam. Konten positif dan kreatif dibutuhkan di tengah kema-

juan teknologi informasi yang kian pesat.

“Penyuluh harus memiliki cara komunikasi yang baik, memanfaatkan teknologi informasi. Generasi saat ini sangat berbeda, cara belajar mereka berbeda dengan generasi sebelumnya. Penyuluh Aga-

ma Islam harus tertantang untuk membuat konten positif tentang pembela-jaran agama yang singkat, santai melalui banyak platform media sosial,” ungkap Kepala Kanwil Kemenag DIY Dr Ahmad Baheij dalam acara Pembinaan Pokjalah Agama Islam DIY di Omah Cemara Pecel Blora Sleman, Rabu (23/10).

Kepala Kemenag Sleman H Sidik Pramono SAg MSi tak menampik, di era saat ini tantangan Penyuluh Agama Islam sangat berat. Miras, narkoba, pergaulan bebas telah menjadi momok masyarakat. Tak sedikit terparanya para pemuda berawal dari ruang digital yang sedemikian bebas.

“Perlu dipikirkan agar penyuluh bisa masuk di ruang ini. Bisa berkontri-

busi positif dan aktif, agar siap menghadapi perubahan. Di ruang digital, media sosial bisa disisipkan materi yang menarik dan mudah diterima masyarakat,” kata Sidik Pramono.

H Ja’far Arifin SAg MA, Ketua Pokjalah Agama Islam Kanwil Kemenag DIY menjelaskan kegiatan Pembinaan Pokjalah Agama Islam DIY yang bertemakan Peningkatan, Penguatan dan Pemberdayaan Pokjalah Agama Islam DIY diikuti 43 peserta, termasuk perwakilan Pokjalah dari Kabupaten/Kota di DIY. Di sela acara disampaikan wakaf uang tunai Rp 10 juta dari Pokjalah Agama Islam DIY pada Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) DIY Prof Muhamad.

(Yud)-f

SEDIAKAN SAYURAN RP 20.000 PERPAKET Gemati, Upaya Pemkab Serap Hasil Panen Petani



KR-Istimewa

Pjs Bupati Sleman Kusno Wibowo memperlihatkan paket sayuran dari petani Sleman.

SLEMAN (KR) - Pemkab Sleman melaksanakan Gerakan Membeli Sayuran Petani (Gemati). Aksi ini merupakan gerakan pembelian paket sayuran oleh pegawai di lingkungan Pemkab Sleman yang bertujuan menyerap hasil panen petani yang melimpah.

Menurut Kepala Bagian Perekonomian Setda Sleman Suyanto, Gemati dilatarbelakangi kondisi ketersediaan sayuran yang melimpah dan terjadinya penurunan harga sayuran di tingkat petani. Kemunculan gerakan ini juga sebagai tindak lanjut Surat Badan Pangan Nasional Nomor 659/TS.02.01/B/10/2024 tanggal 08 Oktober 2024 perihal Penyerapan Cabai Petani.

“Dalam Gemati ini disediakan paket sayuran seharga Rp 20.000,00 yang terdiri dari cabai merah keriting, terong, kubis, tomat dan atau menyesuaikan hasil panen petani. Penyedia sayuran adalah Titik Kumpul Sayuran Perkumpulan Petani Hortikultura Puncak Merapi,” jelas Suyanto, Rabu (23/10).

Terkait gerakan ini, Pjs Bupati Sleman

Kusno Wibowo mengimbau agar pegawai di lingkungan Pemkab Sleman dapat ikut mendukung gerakan ini. Tak hanya mengatasi deflasi, gerakan ini dinilai juga menjadi upaya bersama untuk meningkatkan kesejahteraan Sleman.

“Gerakan pembelian sayur ini ditargetkan untuk dibeli ASN di lingkup Pemkab Sleman dan BUMD. Mungkin nanti kalau masih ada nanti kita bisa menggandeng perusahaan swasta, nanti akan kita lihat,” jelasnya.

Menurut Kusno, Gemati menjadi wujud kolaborasi bersama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Sleman. Menurut data yang diterima, hingga saat ini lebih dari 1.000 paket telah terjual di lingkup Pemkab Sleman. Untuk itu, diharapkan aksi ini dapat menjadi jalan keluar dari permasalahan petani Sleman.

“Kami sampaikan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi. Kami harap melalui Gemati ini dapat membantu permasalahan deflasi yang dihadapi petani dan meningkatkan perekonomian Sleman,” tambah Kusno. **(Has)-f**

MULAI PASAR MURAH HINGGA REDUKSI BIAYA

Sleman Siapkan Strategi Antisipasi Deflasi

SLEMAN (KR) - Pemkab Sleman melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Sleman terus berupaya mengantisipasi dampak terjadinya deflasi. Salah satunya melalui kegiatan pasar murah untuk beberapa jenis kebutuhan pokok.

“Sebagai upaya menghadapi kelesuan ekonomi akibat deflasi dan mengantisipasi Inflasi, TPID Sleman akan mengadakan pasar murah beberapa kebutuhan pokok seperti beras dan gula pasir,” ungkap Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman bidang Perekonomian dan Pembangunan Haris Martapa di Sleman, kemarin.

Kegiatan pasar murah tersebut, menurut Haris dilaksanakan selama 10 hari yakni pada 5 hingga 15 November di 17 kapanewon. “Pasar murah dengan tema ‘Semar Mesem lan Mrantasi’ ini bekerja sama dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Sleman dalam penyediaan QRIS oleh Bank BPD DIY dan Bank Indonesia dalam dukungan anggaran,” jelasnya.

Selain menggelar pasar murah, TPID Sleman juga memberikan program reduksi biaya distribusi sebesar Rp 2.000 perkilogram untuk komoditas beras, gula pasir, telur ayam dan daging ayam. Pemberian reduksi ini guna mengendalikn perubahan harga, baik kenaikan maupun penurunan harga bahan pokok menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

“Pemkab Sleman juga menjalin kerja sama antardaerah ‘business to business’ dalam pe-

menuhan bahan pangan pokok. Dalam kerja sama tersebut Pemkab Sleman memasok kebutuhan beras ke Bantul, sedangkan Bantul memasok kebutuhan bawang merah ke Sleman. Ini karena produksi beras di Sleman surplus, dan Bantul merupakan daerah penghasil bawang merah di DIY,” beber Haris.

Ditambahkan, dalam kerja sama tersebut Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Sidomulyo Godean Sleman telah memasok beras produksi Sleman ke Samsat Bantul sebesar 2.600 kg perbulan, Mirota Tirtanirmolo 6.000 kg perbulan dan Mirota Jalan Imogiri 5.000 kg perbulan. Selain itu, telah ada

kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya alam petani Bantul melalui studi tiru pengelolaan pasar lelang di Perkumpulan Petani Hortikultura Puncak Merapi (PPHPM) Kabupaten Sleman guna mempelajari sistem pasar lelang yang sudah dijalankan oleh PPHPM Kabupaten Sleman. **(Has)-f**



Ada 'Sapa Aruh Warga Sleman' di Car Free Day

HUJAN yang masih belum merata di Kabupaten Sleman mengakibatkan sejumlah padukuhan mengalami krisis air bersih. Kondisi tersebut tergambarkan dari laporan warga di Padukuhan Jonggrangan Kalurahan Sendangrejo Kapanewon Minggir.

Menanggapi laporan situasi tersebut, Pemkab Sleman melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sigap melakukan tindak lanjut dengan melakukan dropping air bersih sebanyak 5.000 liter, Kamis (10/10). Air bersih tersebut didistribusikan bagi dua RT (Rukun Tetangga) masing-masing sebanyak 2.500 liter. Tidak hanya di Jonggrangan, BPBD Sleman juga melakukan dropping air bersih dan penyerahan Hydrant Umum kepada Padukuhan Minggir 2, Padukuhan Kergan, Padukuhan Kliran, Padukuhan Tengahan, Padukuhan Dukuhan dan Padukuhan Nanggulan.

Saran dan masukan dari masyarakat merupakan bentuk kepedulian atas pelayanan publik di Kabupaten Sleman. Kami, selalu siap menerima aduan, saran, maupun masukan terkait kebutuhan masyarakat. Masyarakat dapat mengakses berbagai layanan kanal aduan dengan mudah melalui berbagai kanal baik SMS/ WA 08112595000, aplikasi Lapor Sleman dan Call Center di 0274-868405 ext 7900 atau melalui akun media sosial resmi Pemkab Sleman baik Instagram (@kabarsleman), Fanpage (Pemkab Sleman), akun X (@kabarsleman) dan Website (www.slemankab.go.id)

Pjs Bupati Kusno Wibowo



Sebagai upaya *ngaruhke* kebutuhan warga Sleman, akhir pekan ini kami mengundang warga Sleman pada kegiatan ‘Sapa Aruh Warga Sleman’ di Car Free Day (CFD) Lapangan Pemda Sleman. Merujuk pada bahasa Jawa, ‘Sapa Aruh’ adalah ‘tumbung saroja’ yang bermakna saling menyapa. Agenda ini menjadi momentum yang tepat untuk menyam-paikan ‘uneg-uneg’ secara langsung bersama saya, Pjs Bupati Sleman dan Perangkat Daerah

di lingkungan Pemkab Sleman.

‘Sapa Aruh Warga Sleman’ akan digelar pada hari Minggu (27/10) dan 3 November 2024. Kami siap hadir di Lapangan Pemda Sleman untuk mendengarkan dan berdiskusi dengan warga Sleman untuk bersama-sama mencari solusi atas permasalahan yang dijumpai. Layanan ini gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Tidak ada persyaratan yang harus dipenuhi masyarakat, anda cukup datang ke Lapangan Pemda Sleman pada pukul 06.00 - 09.00 pagi.

Tak hanya menyampaikan isi hati, masyarakat dapat sekaligus berolahraga bersama orang tersayang di area Lapangan Pemda Sleman. Jangan lupa, bawa uang secukupnya untuk menikmati jajanan UMKM di seputar lapangan Pemkab Sleman sembari mengaso dengan keluarga. *Mangga*, ajak teman, saudara, ataupun tetangga untuk bersama menyampaikan uneg-uneg di ‘Sapa Aruh Warga Sleman’, sebagai upaya bersama membangun Sleman menjadi rumah bersama yang nyaman. **(*)-f**



Meramu Program Pengentasan Kemiskinan

SLEMAN (KR) - Pengentasan angka kemiskinan masih menjadi permasalahan di setiap daerah, termasuk Kabupaten Sleman. Bagaimana meramu sebuah kebijakan atau program untuk mengentaskan angka kemiskinan dapat berjalan tepat sasaran, efektif dan efisien. Anggota DPRD Sleman dari Fraksi PAN Respati Agus Sasangka SIP mengatakan, SDM di Kabupaten Sleman ini unggul, namun angka pengangguran terbuka masih relatif tinggi dan angka kemiskinan masih cukup tinggi. Tentu ini masih menjadi PR bagi Pemerintah Kabupaten Sleman.

“Sleman itu banyak perguruan tinggi, pusat ekonomi dan tempat wisata. Tapi angka pengangguran terbuka dan angka kemiskinan masih tinggi. Ini masih jadi catatan kita bersama,” kata Respati atau yang kerap disapa Ade ini.

Dikatakan Ade, selama ini ujung tombak untuk memutus rantai kemiskinan melalui skema bantuan sosial (bansos) dan skema pemberdayaan. Bagaimana kedua skema itu diramu agar tepat sasaran dan tepat manfaat sehingga angka kemiskinan dapat ditekan. “Dua program itu memang jadi ujung tombak dalam pengentasan kemiskinan. Tapi semua itu tergantung cara pelaksanaannya agar tepat sasaran dan tepat manfaat,” ujarnya.

Menurutnya, skema bansos itu tepat untuk mengatasi kemiskinan ekstrim dan absolut misalnya untuk lansia dan disabilitas itupun

Respati Agus Sasangka SIP Anggota DPRD Sleman dari Fraksi PAN



KR-Istimewa

tidak seluruhnya. Sedangkan lainnya dapat diselesaikan dengan cara pemberdayaan pelatihan ketrampilan, pendampingan, dan memberikan solusi permodalan.

“Tidak banyak lansia yang masih bisa disentuh dengan skema pemberdayaan sekalipun tidak semuanya. Tapi masyarakat yang masih berusia produktif, bisa diberikan program pemberdayaan,” ucap politisi dari Dapil Gamping-Mlati ini.

Namun sebelum memberikan program pemberdayaan, perlu ada riset dengan kesungguhan sehingga didapatkan data yang detail. Selanjutnya dilakukan kajian mendalam sebagai bahan untuk mengambil kebijakan atau inovasi. Mengingat kemiskinan itu disebabkan banyak faktor atau masalah. “Bisa jadi, 10 problem kemiskinan yang berbeda harus diselesaikan dengan 10 treatment yang berbeda untuk sampai pada solusi yang tepat. Makanya diperlukan kajian mendalam agar program pemberdayaan bisa tepat sasaran dan tepat manfaat,” papar Ade.

Di samping itu, program pemberdayaan itu juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan, bakat dan minat dari calon penerima. Dengan harapan output dari program pemberdayaan bisa mengentaskan kemiskinan yang sesungguhnya dan permanen. “Semakin banyak program pemberdayaan semakin bagus. Supaya masyarakat punya lebih banyak kemungkinan untuk keluar dari kemiskinan,” tutup Ade. **(Sni)-f**